

BAB V

PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil temuan-temuan lintas situs yang telah dipaparkan pada bab IV maka pada bab ini akan membahas tentang bagaimana pelaksanaan prinsip manajemen pembiayaan dalam mengembangkan lembaga pendidikan yang meliputi prinsip keadilan, prinsip efisiensi, prinsip transparansi dan prinsip akuntabilitas.

- A. Pelaksanaan prinsip keadilan manajemen pembiayaan dalam mengembangkan lembaga pendidikan MA MA'Arif Blitar dan SMA NU 1 Gresik.

Keadilan secara etimologi berarti tidak berat sebelah, tidak memihak, atau menyamaratakan yang satu dengan yang lain. Sedangkan menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI) keadilan berarti siffat (perbuatan, perlakuan dsb) yang adil. Adil sendiri berarti: sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, berpegang pada kebenaran, sepatutnya, atau tidak tidak sewenang-wenang.

Keadilan pendidikan bermakna bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Hal ini kemudian dijabarkan dalam PP Nomor 48 Tahun 2008 merupakan pemberian akses pelayanan pendidikan yang seluas-luasnya dan merata kepada peserta didik atau

calon peserta didik, tanpa membedakan latar belakang suku, ras, agama, jenis kelamin, dan kemampuan atau status ekonomi. Prinsip keadilan dalam pendanaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal 50 bab V PP 48 tahun 2008 berarti bahwa besarnya pendanaan pendidikan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat disesuaikan dengan kemampuan masing-masing.

Kehadiran pemerintah dalam masalah pendidikan sangat dinantikan oleh seluruh bangsa sebagai pengejawantahan dan dari tuntutan Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa salah satu tujuan mendirikan negara Indonesia adalah -mencerdaskan bangsa. Dan untuk menerapkan undang-undang tersebut maka disusunlah Undang-undang no. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional pasal 11 ayat (2) menyebutkan -pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya anggaran guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai lima belas tahun. Di bagian lain -setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.

Prinsip keadilan juga merupakan landasan dalam pengelolaan keuangan sekolah yang mendasari penerimaan dan alokasi keuangan sekolah serta akses pelayanan pendidikan sesuai dengan kebutuhan dari

masing-masing komponen di sekolah. Komponen tersebut meliputi, siswa, guru, karyawan sekolah dan sarana yang menunjang pencapaian tujuan dari sekolah.

Indikator manajemen pembiayaan yang telah melaksanakan prinsip keadilan apabila terdapat beberapa hal sebagai berikut :

- a. Adanya kebijakan yang berorientasi pada pemenuhan dasar bagi masyarakat secara seimbang (subsidi silang, *affirmative action*).
- b. Tersedianya layanan-layanan / fasilitas-fasilitas khusus bagi masyarakat yang kurang mampu.
- c. Adanya pemberdayaan kawasan tertinggal.

Sedangkan indikator keberhasilan pelaksanaan prinsip keadilan dalam manajemen pembiayaan antara lain :

- a. Semua orang berhak memperoleh pendidikan yang layak tanpa terkecuali.
Masyarakat kurang mampu memperoleh layanan-layanan / fasilitas-fasilitas khusus untuk memperoleh pendidikan.

Pelaksanaan prinsip keadilan manajemen pembiayaan pendidikan dalam mengembangkan lembaga pendidikan di MA MA'Arif Blitar indikasi yang tampak berdasarkan hasil temuan sementara bab 4 diantaranya :

1. Penerimaan calon siswa di MA Ma'arif tidak disyaratkan hanya dari strata ekonomi tertentu. Semua memiliki hak yang sama untuk menjadi siswa di MA Ma'arif Blitar.
2. Calon siswa yang diterima di MA Ma'arif Blitar mendapat perlakuan yang sama tanpa membeda-bedakan latar belakang ekonominya.
3. Dana pengembangan dibebankan kepada wali murid menggunakan sistem -gendong ngindetll sesuai dengan kemampuan orang tua siswa.
4. Penetapan besaran dana pengembangan ditentukan oleh tim yang telah melakukan kunjungan ketempat tinggal siswa dan telah mendapatkan persetujuan dari orang tua atau wali siswa.
5. Orang tua atau wali murid membuat surat pernyataan tentang kesanggupan yang terkait dengan besaran dan sistem pembayaran (tempo pembayaran dan cara membayar).

Berdasarkan hasil pembahasan diatas, maka peneliti menyimpulkan, bahwa pelaksanaan prinsip keadilan manajemen pembiayaan pendidikan dalam mengembangkan lembaga pendidikan di MA MA'Arif Blitar telah menyesuaikan penggunaan teori sebagai media untuk membantu menganalisis bahwa pelaksanaan prinsip keadilan

manajemen pembiayaan pendidikan dalam mengembangkan lembaga pendidikan di MA MA'Arif Blitar secara umum dan khusus.

Sementara Pelaksanaan prinsip keadilan manajemen pembiayaan pendidikan dalam mengembangkan lembaga pendidikan di SMA NU 1 Gresik indikasi yang tampak berdasarkan hasil temuan sementara bab 4 diantaranya :

1. Sosialisasi PPDB telah dilakukan di SMP yang ada di kota Gresik dan diinformasikan bahwa sekolah memberikan peluang yang sama dari berbagai latar belakang baik ekonomi, sosial dan tempat tinggal untuk menjadi siswa SMA NU 1 Gresik.
2. Realitas kemampuan ekonomi orang tua siswa yang tidak sama antara satu dengan yang lain, maka sekolah memberikan bagi siswa yang kurang mampu sebesar 50% dengan cara menyerahkan surat keterangan tidak mampu dari kelurahan dan membuat surat pernyataan kesanggupan membayar dana pengembangan.
3. Keringanan juga diberikan kepada anak dari warga yang bertempat tinggal satu kelurahan dengan sekolah dan yang memiliki saudara sekandung yang juga bersekolah di SMA NU 1 Gresik.
4. Tidak ada perlakuan khusus bagi siswa yang berasal dari ekonomi mampu dan kelas bagi yang kurang mampu. Pengaturan kelas didasarkan jenis kelamin dan dan acak tanpa melihat latar belakang siswa.

Berdasarkan hasil pembahasan diatas, maka peneliti menyimpulkan, bahwa pelaksanaan prinsip keadilan manajemen pembiayaan dalam mengembangkan lembaga pendidikan di SMAN NU 1 Gresik telah menyesuaikan penggunaan teori sebagai media untuk membantu menganalisis bahwa pelaksanaan prinsip keadilan manajemen pembiayaan pendidikan dalam mengembangkan lembaga pendidikan di SMAN NU 1 Gresik secara umum dan khusus.

B. Penerapan prinsip efisiensi manajemen pembiayaan pendidikan dalam mengembangkan lembaga pendidikan MA MA'Arif Blitar dan SMA NU 1 Gresik.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), efisiensi diartikan sebagai ketepatan cara dalam melakukan sesuatu, dan kemampuan melaksanakan tugas dengan baik dan tepat tanpa membuang biaya, waktu, dan tenaga. Sedangkan menurut S.P. Hasibuan, pengertian efisiensi adalah perbandingan yang terbaik antara *input* (masukan) dan *output* ((hasil antara keuntungan dengan sumber-sumber yang dipergunakan), seperti halnya juga hasil optimal yang dicapai dengan penggunaan sumber yang terbatas.⁹⁵

Efisiensi merupakan perbandingan antara masukan (input) dan keluaran (output), antara daya dan hasil. Daya itu meliputi tenaga, waktu, pikiran, dan biaya. Efektifitas dan efisiensi dalam penggunaan atau

⁹⁵ Hasibuan, *Manajemen Sumber Daya Manusia*. 65

pengelolaan pembiayaan pendidikan akan sangat berpengaruh pada kualitas proses dan pencapaian tujuan pendidikan yang telah ditetapkan.

Konsep tentang efisiensi lebih pada gambaran hubungan antara pemasukan dan pengeluaran. Selain itu juga dikaitkan dengan kualitas layanan, dan keluaran dari aktifitas penyelenggaraan pendidikan. Efisiensi pendidikan merupakan pendayagunaan sumber-sumber pendidikan yang terbatas akan tetapi mencapai hasil yang optimal. Dengan demikian dalam masalah efisiensi manajemen pembiayaan pendidikan tentu dikaitkan dengan kualitas hasil suatu kegiatan yang dibiayai sesuai dengan kebutuhan yang ada.

Pelaksanaan proses pendidikan yang efisien adalah apabila pendayagunaan sumber daya seperti waktu, tenaga, dan biaya tepat sasaran, dengan lulusan dan produktifitas pendidikan yang optimal. Pada saat sekarang ini, pelaksanaan pendidikan di Indonesia jauh dari efisien, dimana pemanfaatan segala sumber daya yang ada belum menghasilkan lulusan yang sesuai dengan yang diharapkan.

Efisiensi dapat dikelompokkan ke dalam dua jenis, yaitu: a) Efisiensi internal yaitu kegiatan yang menghasilkan output yang diharapkan dengan biaya yang minim. b) efisiensi eksternal sering dihubungkan dengan metode *cost benefit analysis* yaitu rasio antara keuntungan financial sebagai hasil pendidikan dengan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk pendidikan.

Pelaksanaan prinsip keadilan manajemen pembiayaan pendidikan dalam mengembangkan lembaga pendidikan di MA MA'Arif Blitar dan

SMA NU 1 Gresik indikasi yang tampak berdasarkan hasil temuan sementara bab 4 diantaranya:

1. Pada setiap awal tahun pelajaran, kepala madrasah membentuk tim pengembang yang bertugas menyusun RAPBM (Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Madrasah) yang terdiri dari kepala madrasah, majlis madrasah, wakil kepala madrasah, guru dan karyawan .
2. Salah satu isi dari RAPBM yaitu tentang rencana program pengembangan sarana dan prasarana yang ada di MA Ma'arif Blitar.
3. Dalam penyusunan program pengembangan sarana dan prasarana, tim pengembang meminta masukan dari warga sekolah dan kemudian disusun skala prioritas yang akan dilaksanakan.
4. Perencanaan pengembangan sarana dan prasarana diawali dengan menyusun RAB (Rencana Anggaran dan Belanja) sebagai panduan pelaksanaan program.
5. Program pengembangan dan RAB (Rencana Anggaran dan Belanja) menjadi standar atau alat dalam melakukan pengawasan.

Berdasarkan hasil pembahasan diatas, maka peneliti menyimpulkan, bahwa penerapan prinsip efisiensi manajemen pembiayaan pendidikan dalam mengembangkan lembaga pendidikan telah menyesuaikan penggunaan teori sebagai media untuk membantu menganalisis bahwa Penerapan prinsip efisiensi manajemen pembiayaan pendidikan dalam mengembangkan lembaga pendidikan di MA MA'Arif Blitar secara umum dan khusus.

Pelaksanaan prinsip keadilan manajemen pembiayaan pendidikan dalam mengembangkan lembaga pendidikan di SMA NU 1 Gresik indikasi yang tampak berdasarkan hasil temuan sementara bab 4 diantaranya.

1. Pada tiap tahun pelajaran baru disusun tim pengembang yang terdiri dari kepala sekolah, komite sekolah, guru dan karyawan.
2. Tim pengembang bertugas menyusun rencana program pembinaan akademik dan non akademik dan program pengembangan sarana dan prasarana.
3. Dalam menyusun rencana program pengembangan sarana dan prasarana, tim pengembang meminta masukan masukan dari guru dan komponen sekolah lainnya dan dipilih untuk menjadi prioritas dengan harapan hasil dari pengembangan dapat meningkatkan efisiensi pembinaan, pembelajaran dan pengembangan diri siswa.
4. Rencana pengembangan sarana dan prasarana yang ada di RAPBS dikembangkan kedalam RAB yang berisi tentang susunan tim pengembang, pengesahan dari kepala sekolah, rincian rencana anggaran dan belanja serta waktu pelaksanaan.
5. Dalam melaksanakan program pengembangan tim pengembang mengangkat konsultan yang akan membantu meningkatkan efisiensi anggaran, waktu dan kualitas hasil pengembangan.

Berdasarkan hasil pembahasan diatas, maka peneliti menyimpulkan, bahwa penerapan prinsip efisiensi manajemen pembiayaan

pendidikan dalam mengembangkan lembaga pendidikan telah menyesuaikan penggunaan teori sebagai media untuk membantu menganalisis bahwa Penerapan prinsip efisiensi manajemen pembiayaan pendidikan dalam mengembangkan lembaga pendidikan di SMA NU 1 Gresik secara umum dan khusus.

C. Penerapan prinsip transparansi manajemen pembiayaan pendidikan dalam mengembangkan lembaga pendidikan MA MA'Arif Blitar dan SMA NU 1 Gresik.

Transparansi berasal dari kata transparent yang memiliki arti jelas, nyata dan bersifat terbuka. Istilah transparansi dapat diartikan sebagai kejelasan atau keterbukaan informasi. Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai.

Menurut Edah Jubaedah, transparansi atau keterbukaan adalah prinsip untuk membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh akses informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan organisasi dengan memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara.⁹⁶

Prinsip transparansi dalam manajemen pembiayaan pendidikan atau keuangan berarti adanya keterbukaan dalam mengelola kegiatan di lembaga

⁹⁶ Dkk, *Model Pengukuran Pelaksanaan Ood Governance Di Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota*.

pendidikan. Keterbukaan ini meliputi sumber, jumlah, rincian penggunaan dan petanggung jawaban yang jelas sehingga akan dapat mempermudah bagi pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengetahuinya.

Masalah transparansi ini telah ditegaskan oleh Undang-undang Republik Indonesia no. 14 Tahun 2008 pasal 2 yaitu bahwa setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik. Dengan dasar undang-undang ini sekolah sebagai penyelenggara pendidikan dan pengajaran memiliki kewajiban untuk memberikan layanan informasi dan akses informasi kepada semua pihak yang berkepentingan (stakeholder) untuk memperoleh informasi yang transparan dan akuntabel.

Tujuan transparansi dalam pengelolaan keuangan adalah untuk mencegah sedini mungkin terjadinya penyimpangan-penyimpangan melalui kesadaran masyarakat dengan adanya kontrol sosial. Selain dari pada itu, dengan adanya traansparansi dalam pengelolaan keuangan akan dapat menumbuhkan dan menambah wawasan dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap organisasi.

Penerapan transparansi dalam manajemen pembiayaan pendidikan akan membawa dampak dan konsekuensi pada adanya kontrol yang berlebihan dari publik dan pemangku kepentingan (stakeholder). Dengan demikian transparansi dalam manajemen pembiayaan pendidikan tidak sepenuhnya harus terbuka dan dapat diketahui oleh publik.

Lembaga pendidikan yang telah melaksanakan prinsip manajemen transparansi terdapat indikator :

- a. Penyediaan informasi yang jelas tentang prosedur-prosedur, biaya-biaya dan tanggung jawab.
- b. Kemudahan akses informasi.
- c. Menyusun mekanisme pengaduan.

Meningkatkan arus informasi melalui kerjasama adengan media massa dan lembaga non pemerintah.

Pelaksanaan prinsip keadilan manajemen pembiayaan pendidikan dalam mengembangkan lembaga pendidikan di MA MA'Arif Blitar indikasi yang tampak berdasarkan hasil temuan sementara bab 4 diantaranya :

1. Program pengembangan khususnya pengembangan sarana dan prasarana disosialisasikan kepada guru dan karyawan pada saat rapat dinas dan siswa pada saat upacara bendera.
2. Sosialisasi kepada wali murid dilaksanakan dengan mengundang orang tua untuk mendapatkan paparan program pembinaan dan program pengembangan sarana dan prasarana yang meliputi program, estimasi dana yang dibutuhkan, beban yang harus dibayarkan oleh masing-masing siswa, waktu pelaksanaan dan lain-lain.
3. Program pengembangan sarana dan prasarana bisa diakses oleh masyarakat atau siapa saja melalui media yaitu : facebook (MA Ma'arif

Udanawu Blitar), instagram (@ maalmablitar) dan web (www.maalmablitar.sch.id).

4. Bagi orang tua siswa yang merasa kurang mampu bisa mengajukan keringan atau potongan dari besaran pembayaran sumbangan pengembangan sarana dan prasarana.
5. Bagi guru, orang tua dan masyarakat bisa melihat dan bertanya tentang progres pelaksanaan program pengembangan sarana dan prasaran kepada tim pengembang.

Berdasarkan hasil pembahasan diatas, maka peneliti menyimpulkan, bahwa prinsip transparansi manajemen pembiayaan pendidikan dalam mengembangkan lembaga pendidikan telah menyesuaikan penggunaan teori sebagai media untuk membantu menganalisis bahwa prinsip transparansi manajemen pembiayaan pendidikan dalam mengembangkan lembaga pendidikan di MA MA'Arif Blitar secara umum dan khusus.

Sementara Pelaksanaan prinsip keadilan manajemen pembiayaan pendidikan dalam mengembangkan lembaga pendidikan di SMA NU 1 Gresik indikasi yang tampak berdasarkan hasil temuan sementara bab 4 diantaranya :

1. Sosialisasi program pengembangan sarana dan prasarana kepada guru dilaksanakan pada saat rapat khusus di awal tahun pelajaran dan

sosialisasi ke siswa dilaksanakan ketika upacara bendera diawal tahun pelajaran.

2. Sosialisasi kepada wali siswa atau orang tua siswa dengan cara mengundangnya untuk mendapatkan penjelasan tentang program pembinaan dan pengembangan sarana dan prasarana serta prosentase peruntukan dana yang diserahkan orang tua atau wali siswa ke sekolah.
3. Bagi orang tua siswa atau wali siswa yang menginginkan penjelasan tentang program pengembangan sarana dan prasarana atau akan memberikan masukan bisa langsung kepada tim pengembang baik secara bertemu langsung atau melalui telpon.
4. Orang tua dan masyarakat dapat mengakses program pembinaan, program pengembangan sarana dan prasarana atau progrs pelaksanaan pengembangan melalui media sosial yaitu : web (www.smanu1-gresik.sch.id), facebook (SMA Nahdlatul Ulama' 1 Gresik), instagram (@smunsagresik) dan SMUNSA TV.

Berdasarkan hasil pembahasan diatas, maka peneliti menyimpulkan, bahwa prinsip transparansi manajemen pembiayaan pendidikan dalam mengembangkan lembaga pendidikan telah menyesuaikan penggunaan teori sebagai media untuk membantu menganalisis bahwa prinsip transparansi manajemen pembiayaan

pendidikan dalam mengembangkan lembaga pendidikan di SMA NU 1 Gresik secara umum dan khusus.

D. Penerapan prinsip akuntabilitas manajemen pembiayaan pendidikan dalam mengembangkan lembaga pendidikan MA MA'Arif Blitar dan SMA NU 1 Gresik

Kata akuntabilitas berasal dari kata *account* yang berarti catatan atau laporan dan *ability* yang berarti kemampuan. Akuntabilitas secara umum dapat diartikan suatu bentuk pertanggung jawaban. Organisasi yang *accountable* adalah organisasi yang mampu menyajikan informasi secara terbuka mengenai keputusan-keputusan yang telah diambil dan memungkinkan pihak luar mereview informasi tersebut, serta bila dibutuhkan harus ada kesediaan untuk mengambil tindakan kreatif. Akuntabilitas dapat juga diartikan sebagai kemampuan atau sikap menunjukan pertanggung jawaban atau laporan.

Akuntabilitas merupakan kondisi dimana seseorang dinilai karena performanya dalam menyelesaikan tugas yang diamanahkan kepadanya dan dapat mempertanggung jawabkannya. Pertanggung jawaban tersebut bisa kepada orang tua, masyarakat dan pemerintah.

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk melayani, memberikan ruang kepada pengamat independen yang memiliki hak untuk dapat melaporkan temuan atau informasi-informasi terkait dengan administrasi keuangan suatu organisasi.

Menurut E. Mulyana, akuntabilitas adalah pertanggungjawaban pengelolaan keuangan sekolah dalam implementasi manajemen berbasis sekolah dituntut untuk memberikan pertanggungjawaban pada setiap akhir tahun anggaran sekolah dengan dikeluarkannya dana selama tahun anggaran. Pertanggungjawaban tersebut dilaksanakan dalam rapat dewan sekolah yang diikuti oleh komponen sekolah, masyarakat dan pemerintah daerah.

Akuntabilitas dalam manajemen pembiayaan atau keuangan lembaga pendidikan berarti penggunaan uang lembaga pendidikan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.⁹⁷

Tujuan akuntabilitas adalah untuk menumbuhkan kepercayaan publik terhadap sekolah. Jadi dapat dimengerti bahwa kepercayaan publik itu berbanding lurus dengan apa yang dilakukan oleh sekolah.

Kegunaan dan fungsi akuntabilitas sebagaimana yang disampaikan oleh Afid Burhanuddin antara lain yaitu :

- a. Akuntabilitas berfungsi untuk memberikan jaminan melalui evaluasi eksternal bahwa instansi dapat dinilai akuntabel bagi stakeholder.
- b. Akuntabilitas berfungsi untuk memastikan bahwa berbagai prinsip dan praktek yang ada di dalam organisasi atau instansi tidak tererosi atau habis oleh waktu dan ketinggalan jaman.

⁹⁷ Rusdiana, *Pengelolaan Keuangan Pendidikan*. . 72

- c. Akuntabilitas berfungsi sebagai isyarat bahwa program yang telah digariskan telah berjalan sebagaimana mestinya.
- d. Akuntabilitas berfungsi sebagai evaluasi kualitas dari hasil program yang dilaksanakan.⁹⁸

Untuk mendapatkan akuntabilitas publik perlu diupayakan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Sekolah harus menyusun aturan main tentang sistem akuntabilitas termasuk mekanisme pertanggungjawaban.
- 2) Sekolah perlu menyusun pedoman tingkah laku dan sistem pemantauan kinerja penyelenggara sekolah dan sistem pengawasan dengan sanksi yang jelas dan tegas.
- 3) Sekolah menyusun rencana pengembangan dan menyampaikan kepada publik/sakeholders disetiap awal tahun anggaran.
- 4) Menyusun indikator yang jelas tentang pengukuran kinerja sekolah dan disampaikan kepada stikeholders.
- 5) Melakukan pengukuran pencapaian kinerja pelayanan pendidikan dan menyampaikan kepada publik pada akhir tahun.
- 6) Memberikan tanggapan terhadap pertanyaan atau pengaduan publik.
- 7) Menyediakan informasi kegiatan sekolah kepada publik yang akan memperoleh pelayanan pendidikan.

⁹⁸ Afid Burhanuddin, —Akuntabilitas Pembiayaan Pendidikan
<https://afidburhanuddin.wordpress.com/2014/01/17/>

8) Memperbaharui rencana kinerja sebagai kesepakatan komitmen yang baru.

Pelaksanaan prinsip manajemen pembiayaan yaitu akuntabilitas ini diharapkan dapat meningkatkan kepuasan publik/stakeholders terhadap layanan pendidikan. Dan untuk meningkatkan akuntabilitas ini dibutuhkan pengawasan publik dalam mengelola dana yang diperoleh dan dihimpun dari pemerintah, orang tua dan masyarakat.

Pelaksanaan prinsip keadilan manajemen pembiayaan pendidikan dalam mengembangkan lembaga pendidikan di MA MA'Arif Blitar dan SMA NU 1 Gresik indikasi yang tampak berdasarkan hasil temuan sementara bab 4 diantaranya :

1. Tim pengembang sarana dan prasarana menyusun rencana pengembangan dan disahkan oleh kepala sekolah dan ketua yayasan.
2. Kedua dalam pelaksanaan program pengembangan sarana dan prasarana , tim pengembang memberikan laporan secara periodik yaitu setiap bulan untuk melaporkan progres pengembangan yang dilakukan dan tiga bulan sekali untuk pelaporan penggunaan dana pengembangan sarana dan prasarana.
3. Pelaporan kepada orang tua siswa dilakukan apabila pelaksanaan program pengembangan sarana dan prasarana telah selesai dilaksanakan yaitu pada saat penerimaan rapor semester genap sebagai bentuk

pertanggung jawaban atas dana yang diberikan oleh orang tua siswa atau wali siswa.

4. Hasil dari pelaksanaan program pengembangan sarana dan prasarana bisa diakses di media yang telah tersedia.

Dana pengembangan dibebankan dan harus dibayar oleh siswa baru kelas X dan tanpa membebani kelas lama yaitu kelas XI dan kelas XII.

Berdasarkan hasil pembahasan diatas, maka peneliti menyimpulkan, bahwa penerapan prinsip akuntabilitas manajemen pembiayaan pendidikan dalam mengembangkan lembaga pendidikan telah menyesuaikan penggunaan teori sebagai media untuk membantu menganalisis bahwa penerapan prinsip akuntabilitas manajemen pembiayaan pendidikan dalam mengembangkan lembaga pendidikan dalam mengembangkan lembaga pendidikan di MA MA'Arif Blitar secara umum dan khusus.

Sementara pelaksanaan prinsip akuntabilitas manajemen pembiayaan pendidikan dalam mengembangkan lembaga pendidikan di SMA NU 1 Gresik indikasi yang tampak berdasarkan hasil temuan sementara bab 4 diantaranya :

1. Pelaporan disampaikan secara periodik tiap 3 bulan sekali dan diserahkan kepada kepala sekolah dan komite sekolah. Selain dari itu laporan bisa disampaikan insidental bila sewaktu-waktu dibutuhkan.

2. Pelaksanaan program yang telah selesai dilaksanakan akan dilakukan audit oleh auditor internal maupun auditor eksternal tentang administrasi keuangan untuk memastikan penggunaan dana dari orang tua atau wali murid benar-benar dipergunakan sebagaimana program yang telah disahkan.
3. Sosialisasi laporan kepada warga sekolah dilaksanakan pada saat rapat dinas dan sosialisasi kepada orang tua siswa atau wali siswa dilaksanakan ketika mereka diundang untuk menerima raport semester genap.
4. Dana pengembangan ini di ambil dari wali siswa kelas X, kelas XI dan kelas XII dengan besaran yang berbeda.
5. Dampak dari sosialisasi laporan kepada orang tua atau wali siswa dan stakeholder, mereka akan mengetahui bahwa dana tersebut benar-benar dipergunakan untuk pengembangan dan akan menimbulkan kepercayaan yang tinggi.

Berdasarkan hasil pembahasan diatas, maka peneliti menyimpulkan, bahwa penerapan prinsip akuntabilitas manajemen pembiayaan pendidikan dalam mengembangkan lembaga pendidikan telah menyesuaikan penggunaan teori sebagai media untuk membantu menganalisis bahwa penerapan prinsip akuntabilitas manajemen pembiayaan pendidikan dalam mengembangkan lembaga pendidikan

dalam mengembangkan lembaga pendidikan di SMA NU Gresik secara umum dan khusus.